

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DI KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KOTA SOLOK BERDASARKAN PERDA NO. 17 TAHUN 2008**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Ilmu Administrasi Negara sebagai salah
satu Persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik*



OLEH:

DITA MAHARANI

1101608/2011

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Berdasarkan
Perda No.17 Tahun 2008

Nama : Dita Maharani

NIM : 1101608

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

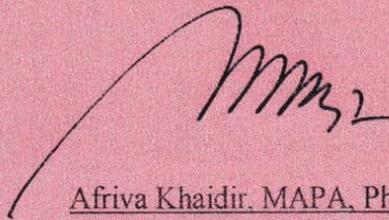
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 5 Februari 2016

Disetujui Oleh:

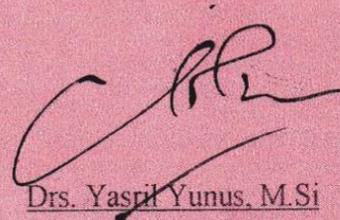
Pembimbing I



Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D

NIP. 196604111990031002

Pembimbing II



Drs. Yasril Yunus, M.Si

NIP. 195310171982111002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

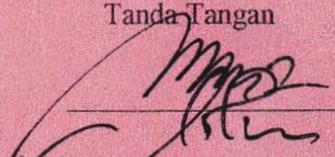
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Jumat Tanggal 05 Februari 2016 pukul 11.00-13.00 WIB

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK BERDASARKAN PERDA NO.17 TAHUN 2008

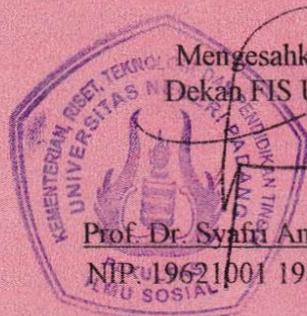
Nama : Dita Maharani
NIM/TM : 1101608/2011
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 05 Februari 2016

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir MAPA, Ph.D	
Sekretaris	: Drs. Yasril Yunus, M.Si	
Anggota	: Dra. Jumiati, M.Si	
Anggota	: Drs. Syamsir M.Si, Ph.D	
Anggota	: Zikri Alhadi, S.IP, MA	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dita Maharani
NIM/TM : 1101608 / 2011
Tempat/Tanggal Lahir : Solok / 2 Januari 1993

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Berdasarkan Perda No.17 Tahun 2008” adalah benar merupakan hasil karya asli saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Februari 2016
Yang Membuat Pernyataan,



DITA MAHARANI
1101608 / 2011

ABSTRAK

DITA MAHARANI : Nim 2011/1101608. Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2008

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, seperti program keluarga berencana belum dilaksanakan secara efektif sejak diberlakukannya Perda Kota Solok No. 17 Tahun 2008. Selanjutnya masih kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi terutama bagi kaum pria. Adanya desentralisasi membuat kebijakan nasional tidak serta merta dapat diterima di masing-masing daerah, anggaran yang terbatas membuat sosialisasi KB harus dapat dicari strategi dengan memanfaatkan elemen masyarakat lain dan anggaran yang efektif, dan image masyarakat harus diubah tidak hanya membatasi kelahiran namun meningkatkan kualitas manusia, dan mensinergikan program KB dengan pandangan agama yang masih bertentangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan program keluarga berencana di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berjalan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang diperoleh selama penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana (KB) pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sudah berjalan, namun masih belum terlaksana dengan optimal. Hal tersebut terlihat dari beberapa aspek yaitu proses pelaksanaan kebijakan yang masih belum maksimal karena masih adanya kekurangan di beberapa bagian. Seperti masih kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kesuksesan program keluarga berencana (KB). Masih adanya hal-hal yang menyimpang terjadi selama proses kebijakan yang belum sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, serta kendala yang masih banyak ditimbulkan dan terjadi sampai saat ini.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbila'lamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2008”**. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Kepada keluarga, sahabat, serta tak lupa juga kita yang senantiasa selalu istiqamah dan ikhlas untuk menjadi umatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

3. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si sebagai Pembimbing Akademik yang memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir.
4. Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi, membimbing, dan memberi masukan serta motivator bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dra. Jumiati, M.Si, Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D, dan Bapak Zikri Alhadi, S.IP, MA selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan berupa saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing penulis selama belajar di UNP.
7. Bapak Dr. Muhammad Effendy selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Solok. Ibu Anri Novi. SKM. MM dan Ibu Dra. Zurneli, MM selaku SubBidang Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Solok dan Bapak Irwin. A.Md selaku kepala UPT Kecamatan Tanjung Harapan. Kader-kader KB, Bidan dan Akseptor-akseptor di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
8. Teristimewa untuk ayahanda dan ibunda tercinta dan seluruh keluarga yang telah memberikan do'a, dukungan serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan terutama rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang angkatan 2011 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan

kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan penuh harapan dan do'a semoga penelitian sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Amin ya rabbal allamin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Padang, Februari 2016

Penulis
Dita Maharani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	15
1. Konsep Implementasi Kebijakan.....	15
2. Konsep Evaluasi Kebijakan.....	20
a) Pengertian Evaluasi Kebijakan.....	20
b) Fungsi Evaluasi Kebijakan	23
c) Tipe Evaluasi Kebijakan	24
d) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	26
e) Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik.....	28

3. Kebijakan Keluarga Berencana dalam Upaya Pengendalian Penduduk.....	30
a) Konsep Demografi.....	30
b) Program Keluarga Berencana.....	32
4. Konsep Peraturan Daerah.....	37
B. Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	45
F. Uji Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	50
B. Temuan Khusus.....	67
C. Pembahasan.....	93
1. Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Berdasarkan Perda No.17 Tahun 2008	93
a. Evaluasi Proses.....	95
b. Evaluasi Dampak.....	97

c. Evaluasi Strategi.....	100
2. Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Berdasarkan Perda No.17 Tahun 2008	102
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	43
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Per Kelurahan.....	51
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.3 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 4.4 Susunan Kepegawaian Badan KBPMP Kota Solok.....	69
Tabel 4.5 Data Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tahun 2013-2014.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Penduduk Kota Solok 2009 - 2013	9
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	40
Gambar 4.1	Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP).....	53
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Badan KBPMP.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah yang dihadapi beberapa negara berkembang dewasa ini adalah mengurangi jumlah kemiskinan dengan menggunakan berbagai cara, baik melalui peningkatan infrastruktur ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, pasar, serta sarana lain, maupun membangun derajat dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pendidikan maupun kesehatan. Namun demikian kendala utama yang dihadapi hampir semuanya sama, yang umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan. Mulai dari masih tingginya angka kematian bayi, dan ibu melahirkan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi, serta masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk, yang tidak sebanding dengan daya dukung lingkungan. (Wikipedia 2009)

Keprihatinan akan permasalahan kependudukan melahirkan sebuah konsep pembangunan berwawasan kependudukan, atau konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dari sinipula lahir kesadaran dunia untuk mengurai masalah kemiskinan dan keterbelakangan melalui pendekatan kependudukan. Salah satu program yang layak untuk mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk adalah program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana sebagai salah satu usaha untuk mengatasi masalah kependudukan seperti dikemukakan diatas, pada umumnya orang berpendapat bahwa ide keluarga berencana tersebut adalah suatu hal yang baru. Pendapat yang demikian ini adalah tidak benar, sebab keluarga berencana (yang

dimaksud disini mencegah kehamilan) sudah ada sejak jaman dahulu. Memang di Indonesia adanya keluarga berencana masih baru (abad XX) dibandingkan dengan negara-negara barat.

Pengertian Program Keluarga Berencana menurut UU No 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) Adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera yang kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. (Adambaladika 2012)

Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) pada era reformasi dipengaruhi oleh berbagai perubahan lingkungan strategis. Paradigma baru dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tertuang pada UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah posisi Program KB. Sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, kini eksistensinya sepenuhnya menjadi keputusan pemerintah kabupaten/kota termasuk perubahan pengelolaan program lini di lapangan.

Perubahan paradigma ini otomatis berimplikasi pada perubahan sistem dan manajemen program pelayanan KB, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Kondisi ini mengharuskan daerah memiliki kesiapan yang matang dalam melayani masyarakat termasuk dalam program pelayanan KB. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan program KB Nasional/BKKBN, maka Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan salah satu urusan wajib pemerintah. Dengan demikian Peraturan Pemerintah RI tersebut menegaskan bahwa Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan program KB dan program KS tersebut di daerahnya masing-masing. (Adambaladika 2012)

Namun sampai saat ini belum semua propinsi di tiap daerah menerapkan PP tersebut. Hal ini tercermin dari belum memadainya komitmen pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan program KB yang dapat dilihat dari bervariasinya bentuk kelembagaan KB maupun dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk program KB. Belum memadainya komitmen pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan program KB membawa konsekuensi melemahnya dukungan terhadap pelaksanaan mekanisme dan sistem operasional program KB di lapangan.

Masalah Keluarga Berencana (KB) merupakan masalah yang ada hubungannya dengan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, sosio ekonomi, ketahanan nasional, pembangunan, kriminalitas, moral, kelestarian lingkungan dan kependudukan. Beberapa masalah tersebut yang menjadi sorotan dalam tujuan KB berdasar RENTRA (Rencana Strategi) 2010-2015 yang meliputi keluarga dengan anak ideal, keluarga sehat, keluarga berpendidikan, keluarga sejahtera, keluarga ketahanan, keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya, serta penduduk tumbuh seimbang. Maka keluarga berencana ditantang perlu mengajak masyarakat dan instansi lain untuk berpartisipasi. (Adambaladika 2012)

Berdasarkan perhitungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bila masyarakat Indonesia tidak menjalankan Program KB, diperkirakan pada 2021 penduduk Indonesia mencapai 261 juta manusia. Ledakan penduduk (*baby boom*) merupakan masalah yang masih erat kaitannya dengan masalah Keluarga Berencana yang akan menimbulkan berbagai permasalahan. Diantaranya lapangan kerja menyempit, pengangguran meningkat, dan kemiskinan tidak terkendali. Jumlah keluarga banyak yang tidak diimbangkan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah sebuah malapetaka. Berbagai kasus penelantaran anak, anak bermasalah hukum, fenomena anak jalanan, dan KDRT merupakan di antara malapetaka itu. Laju pertumbuhan penduduk diharapkan bisa ditekan sehingga negara mampu menghemat triliunan rupiah untuk biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, dengan jumlah kelahiran yang terkendali, target

untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan perkapita dapat mudah direalisasikan.

Jumlah penduduk Kota Solok menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014 adalah 63.541 jiwa, dengan pasangan usia subur di Kota Solok sebanyak 10.415. Dari 10.415 pasangan usia subur itu, sebanyak 5.563 tercatat sebagai peserta KB aktif dan 1.528 sebagai peserta KB baru, sementara 3.324 lainnya bukan peserta KB. Pemerintah daerah Kota Solok beserta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengontrol laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk agar tidak terjadinya pertumbuhan penduduk yang pesat dikemudian hari. Upaya pemerintah Kota Solok dalam mengendalikan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk salah satunya adalah dengan turut menyukseskan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Hal ini dilakukan dari kelompok masyarakat yang terkecil yaitu keluarga dengan harapan terbentuknya keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui Program Keluarga Berencana.

Pada tingkatan propinsi kelembagaan yang mengelola program KB adalah BKKBN dan pada tingkat Kabupaten/Kota khususnya Kota Solok menurut Peraturan Daerah Kota Solok nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok menyatakan bahwa Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kemudian lembaga di tingkat kecamatan sebagai motor penggerak di lapangan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan), dipimpin oleh seorang kepala UPT Badan.

Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok merupakan salah satu kecamatan dari Kota Solok, wilayah yang tidak luput dari sasaran program Keluarga Berencana Nasional yang memiliki luas kecamatan kurang lebih 22,64 Km² yang terdiri dari 6 kelurahan yaitu, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Pasar Pandan Airmati, Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Laing. Jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2014 adalah 28.478. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Solok menyatakan bahwa dilihat dari perbandingan penduduk antar kecamatan, penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah lebih besar dibandingkan dengan penduduk Kecamatan Tanjung Harapan. Akan tetapi kepadatan penduduk justru sebaliknya, penduduk di Kecamatan Tanjung Harapan lebih padat dibandingkan dengan penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah.

Seiring dengan berlakunya Perda Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing, terjadi pula

pergeseran paradigma dalam pelaksanaan program KB dilapangan yang mempengaruhi gerak dinamis program KB nasional.

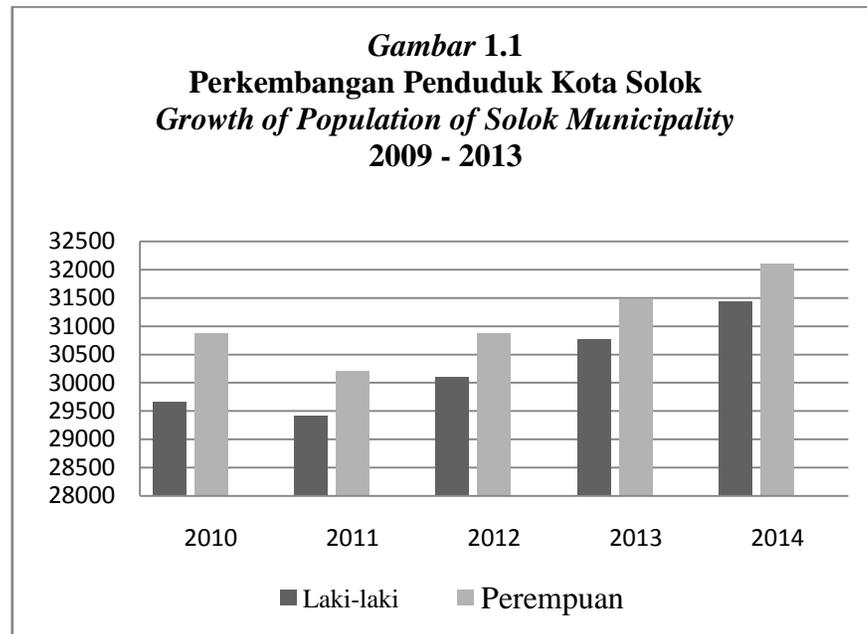
Program KB nasional yang era desentralisasi menjadi primadona pembangunan sumber daya manusia terutama dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak. Pelaksanaannya program KB era otonomi menjadi sangat tergantung kepada kebijakan strategis pemangku jabatan yang ada di daerah. Hal ini tercermin dari belum memadainya komitmen pemerintahan daerah Kab./Kota dalam pengelolaan program KB yang dapat dilihat dari bervariasinya bentuk kelembagaan KB maupun dana yang dialokasikan oleh pemerintahan daerah Kab./Kota untuk program KB. Belum memadainya komitmen pemerintahan daerah Kab./Kota dalam pengelolaan program KB membawa konsekuensi melemahnya dukungan terhadap pelaksanaan mekanisme dan system operasional program KB di lapangan.

Sejalan dengan era otonomi daerah, maka kebijakan program telah dilakukan dan dituangkan kedalam visi, misi dan strategi dasar program KB yang baru. Reformasi arah kebijakan program ke depan ini diperlukan dalam rangka membangun kembali sendi-sendi program yang oleh berbagai kalangan disinyalir melemah dalam era desentralisasi saat ini, sehingga kinerja program diharapkan dapat meningkat dan sasaran-sasaran program KB nasional.

Program kependudukan dan keluarga berencana merupakan program penting dan mendesak untuk menahan laju ledakan penduduk dunia. Makanya, program ini harus dirancang dan dikelola dengan baik karena berhasil atau tidaknya program KB akan mempengaruhi kualitas generasi mendatang. Belakangan ini program KB tidak

tergarap secara baik, karena keberhasilan program ini tidak terukur, berbeda dengan program lainnya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya yang perencanaan dan hasilnya dapat diukur. Akibat tidak terukur, sangat jarang calon kepala daerah saat kampanye Pilkada mengusung program KB sebagai salah program andalannya, sehingga program KB tidak tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat visi dan misi pasangan Kepala Daerah terpilih. Sehingga anggaran kegiatan kependudukan dan keluarga berencana tidak terlalu diprioritaskan kepala daerah karena mereka lebih memprioritaskan program-program yang ada dalam RPJMD (Antara Sumbar 2013)

Oleh sebab itu program ini harus digencarkan lagi. Jadi bukan sekadar mengarah pada faktor kesehatan atau imbauan saja. Penerapan program KB tidak sebanding dengan angka kelahiran, saat ini katanya pengguna KB tinggi, tapi angka kelahiran juga masih tinggi. Orientasi program KB harus mengarah pada pengurangan angka kelahiran. Konteksnya bukan melawan kehendak Tuhan soal kelahiran, tapi ini dalam konteks memenej pemerintahan daerah, salah satunya menghitung aspek penduduk. Perkembang penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya di Kota Solok dapat dilihat dari grafik berikut:



Sumber : BPS Kota Solok

Berdasarkan pengamatan awal, Kecamatan Tanjung Harapan dalam Pencapaian Permintaan Masyarakat (PPM) peserta baru KB pada tahun 2013 di Kecamatan Tanjung Harapan adalah 828 peserta dan pencapaian atau realisasi sebanyak 584 peserta dengan pengguna KB IUD (*Intra Uterine Device*) 114 orang, MOW (Metode Operasi Wanita) 3 orang, MOP (Metode Operasi Pria) tidak ada, kondom 56 orang, implan 91 orang, suntik 224 orang, pil 96 orang.

Sedangkan Pencapaian Permintaan Masyarakat (PPM) peserta baru KB pada tahun 2014 Tanjung Harapan adalah 686 peserta dan pencapaian atau realisasi sebanyak 488 peserta dengan pengguna KB IUD (*Intra Uterine Device*) 108 orang, MOW (Metode Operasi Wanita) 2 orang, MOP (Metode Operasi Pria) tidak ada, kondom 16 orang, implan 78 orang, suntik 253 orang, pil 31 orang.

Dari tahun 2013 sampai tahun 2014 peserta KB baru pada metode kontrasepsi khusus wanita lebih banyak digunakan, terlihat peran wanita di Kecamatan Tanjung Harapan lebih berperan aktif berbanding terbalik dengan peran pria. Pelayanan KB diberikan bukan hanya untuk wanita saja, tetapi peserta KB baru juga diperuntukan pria, hal ini jelas adanya metode kontrasepsi mantap khusus pria yaitu pada sterilisasi MOP. Selain itu pada kontrasepsi mantap sterilisasi MOW terlihat sedikit, padahal efektifitas MOW lebih dari 99% dalam hal pencegahan pembuahan sel telur pada rongga rahim. Pada kontrasepsi mantap sterilisasi MOP tidak ada peserta, padahal efektifitas metode ini lebih dari 99% untuk menutup saluran sperma. Hal inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam, mengapa pada metode kontrasepsi MOW dan MOP sedikit peserta KB baru padahal tingkat keberhasilan menunda kehamilan mencapai 99%.

Seiring dengan hal di atas, berdasarkan wawancara awal yang menyebutkan bahwa ada beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan, permasalahan tersebut ialah sebagai berikut:

Pertama, Tantangan yang dihadapi yaitu adanya desentralisasi membuat kebijakan nasional tidak serta merta dapat diterima di masing-masing daerah, anggaran yang terbatas membuat sosialisasi KB harus dapat dicari strategi dengan memanfaatkan elemen masyarakat lain dan anggaran yang efektif, dan image masyarakat harus diubah tidak hanya membatasi kelahiran namun meningkatkan kualitas manusia, dan mensinergikan program KB dengan pandangan agama yang masih bertentangan.

Kedua, keberhasilan program KB belum dapat tercapai secara keseluruhan, karena masih kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi terutama bagi kaum pria yang telah berkeluarga ini dapat dilihat dari data pencapaian peserta KB baru. Kurangnya peranserta masyarakat antara lain disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat akan metode KB yang ada. Mereka tidak mengetahui tujuan, fungsi, dan efek dari penggunaan metode yang ada. Kemudian peran aktif suami dalam menentukan alat kontrasepsi pada istri cenderung acuh, karena selama istri tidak melahirkan diperbolehkan memilih kontrasepsi apa saja, bahkan suami tidak mengetahui kontrasepsi yang digunakan oleh istri sendiri.

Ketiga, pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana oleh petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) masih kurang maksimal hal ini dapat dilihat dari: 1)Masih kurangnya tenaga PLKB yang memiliki keahlian khusus dan terlatih di bidang KB; 2)Tidak adanya jadwal yang tetap untuk penyuluhan; 3)Sosialisasi/penyampaian informasi mengenai penyuluhan tidak merata; 4)Masyarakat kurang memahami tujuan dari penyuluhan program KB; sehingga masyarakat kurang berminat mengikuti program KB.

Keempat, kurangnya aplikasi di tengah masyarakat terhadap materi – materi dari penyuluhan yang telah diberikan oleh petugas lapangan keluarga berencana. Sebagian masyarakat yang mengikuti penyuluhan hanya mengharapkan uang transportasi yang diberikan oleh pemerintah, tidak untuk menambah pengetahuan akan metode KB.

Kelima, masih adanya faktor kepercayaan terhadap keyakinan terdahulu yang masih kental bahwa banyak anak maka akan banyak rezeki, dengan adanya pemikiran sederhana seperti ini membuat sulit merubah kesadaran pada masyarakat akan pentingnya program KB dalam mengatur jumlah keluarga yang nantinya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi di tiap keluarga. Keluarga dengan penghasilan cukup akan lebih mampu mengikuti program KB daripada keluarga yang tidak mampu, karena bagi keluarga yang kurang mampu KB bukanlah kebutuhan pokok.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang *“Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2008”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, selanjutnya penulis mencoba mengidentifikasi masalah- masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Program KB belum dilaksanakan secara efektif sejak diberlakukannya kebijakan Perda Kota Solok No. 17 Tahun 2008.
2. Kurangnya sosialisasi tentang program KB yang dilakukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana.
3. Masih kurangnya SDM PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang memiliki keahlian khusus dan terlatih di bidang KB.

4. Masih kurang pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi, sehingga masih banyak masyarakat yang takut untuk memasang alat kontrasepsi.
5. Adanya keyakinan terdahulu dan kepercayaan yang masih kental bahwa banyak anak banyak rezeki pada masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan sehingga menghambat pelayanan KB khususnya pada metode kontrasepsi mantap sterilisasi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu batasan – batasan masalah tentang pokok masalah yang akan dibahas. Adapun batasan masalahnya adalah tentang Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Berdasarkan Perda Kota Solok No.17 Tahun 2008.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diteliti adalah:

1. Bagaimana evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan program Keluarga Berencana di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Perda Kota Solok No. 17 Tahun 2008?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Solok dalam penerapan kebijakan program keluarga berencana berdasarkan Perda Kota Solok No.17 Tahun 2008?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Perda Kota Solok No.17 Tahun 2008.
2. Untuk mengidentifikasi kendala pemerintah daerah Kota Solok dalam penerapan kebijakan program keluarga berencana berdasarkan Perda Kota Solok No.17 Tahun 2008.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis : diharapkan penelitian ini dapat mengaplikasikan materi – materi pengajaran mengenai kebijakan public khususnya mengenai evaluasi implementasi kebijakan publik serta dapat memeberikan sumbangan pemikiran guna melakukan pengembangan teori – teori kebijakan publik.
2. Secara praktis :Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi UPT KB di Kota Solok sehingga menjadi umpan balik (*feed back*) dalam implementasi kebijakan program KB serta para pembaca dan bagi warga masyarakat